

**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN,
KETIDAKPATUHAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, UMUR
PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN LEGISLATIF
TERHADAP OPINI AUDIT BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Lisnawati
NIM : 222015014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN,
KETIDAKPATUHAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, UMUR
PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN LEGISLATIF
TERHADAP OPINI AUDIT BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Lisnawati
NIM : 222015014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN,
KETIDAKPATUHAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, UMUR
PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN LEGISLATIF
TERHADAP OPINI AUDIT BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Lisnawati
NIM : 222015014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

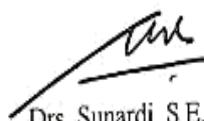
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern,
Ketidapatuhan Pada Perundang-Undangan, Umur
Pemerintah Daerah Dan Ukuran Legislatif Terhadap
Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Di
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Lisnawati
NIM : 222015014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0206046303/784021

Mizan, S.E., Ak. M.Si
NIDN/NBM : 0206047101/85919

Mengetahui,
Dekan

Kabupaten/Kota Program Studi Akuntansi




Fitri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisnawati

NIM : 222015014

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019
Yang Membuat Pernyataan


6000
Lisnawati

ABSTRAK

Lisnawati /222015014/2019/ Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif Terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif Terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif Terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sampel pada penelitian ini adalah 15 Kabupaten/Kota selama 6 tahun berturut-turut, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 data sampel Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif dan tidak signifikan Terhadap Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Secara parsial Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Umur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Ukuran legislatif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: kelemahan SPI, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, umur pemerintah daerah, ukuran legislatif, opini audit badan pemeriksa keuangan.

ABSTRACT

Lisnawati / 222015014/2019 / The Effect of Weaknesses in the Internal Control System, Non-compliance with legislation, Age of Local Government and Legislative Size towards Audit Opinions of the Audit Boards of the Regency / City of South Sumatera Province

The purpose of this study was to determine the effect of weaknesses in the internal control system, non-compliance with legislation, the age of the local government and legislative measure on the audit opinion of the Supreme Audit Agency in the Regency/City of South Sumatera Province. This study used a Multiple Regression Analysis model. The result of this study indicated that simultaneously the weaknesses of the internal control system, non-compliance with legislation, age of the local government and legislative size had a positive and insignificant effect on the audit opinion of the Audit Board in the Regency/City of South Sumatera Province. Partially the weaknesses of the internal control system had no significant effect to the audit opinion of the Supreme Audit Agency in the Regency/City of South Sumatera Province. Non-compliance with legislation had a significant effect on the audit opinion of the Audit Board in the Regency/City of South Sumatera Province. The age of the local government had a significant effect on the audit opinion of the Audit Board's in the Regency/City of South Sumatera Province. The legislative size had no significant effect on the audit opinion of the Supreme Audit Agency in the Regency/City of South Sumatera Province.

Keywords: weaknesses of SPI, non-compliance with legislation, local government age, legislative size, audit board audit opinion.

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan Pada Perundang-Undangan, Umur Pemerintah Daerah Dan Ukuran Legislatif Terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Suswari dan Ibuku Andri Ramiasih, serta adikku Zulia Dwi Khasanah yang telah

memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si & Bapak Mizan, S.E., Ak. M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pegawai di kantor Badan Pemeriksa Keuangan yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang, 2019

Lisnawati

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan	11
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	15

3. Ketidapatuhan Pada Perundang-Undangan.....	19
4. Umur Pemerintah Daerah	19
5. Ukuran Legislatif.....	20
B. Penelitian Sebelumnya	22
C. Kerangka Pemikiran	31
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Operasionalisasi Variabel	34
D. Populasi dan Sampel	35
E. Data Yang Diperlukan.....	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	39
BAB IV	
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Tempat Penelitian.....	48
2. Visi Dan Misi	49
3. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan.....	68
BAB V	
A. Kesimpulan... ..	73

B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penjelasan pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, badan pemeriksa keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK

dilakukan dalam rangka menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan ini berupa laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini.

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Ramli, 2016: 128).

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksaan keuangan yaitu: (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) (Ramli, 2016: 129).

Tiap pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh suatu badan pemeriksa keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, dan mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (Nih dan Darsono: 2015).

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong definisi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah (1) menjaga aset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian internal akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian internal administratif (*internal administrative control*). Pengendalian internal akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuanganyang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016: 129-130).

Suatu laporan keuangan dapat dinilai tidak wajar karena adanya salah saji material yang disebabkan dari tindakan/kegiatan yang melanggar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat

berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan (Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2007). Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui akan menjadi tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Apabila auditor menemukan pengaruh tindakan ketidakpatuhan tersebut bersifat material dan tidak memadai dalam pengungkapannya maka auditor harus memodifikasi audit sesuai dengan hal tersebut.

Umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama pemerintah daerah ada (Mandasari, 2009). Untuk pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk, tentunya dinilai lebih dahulu memiliki kemampuan dalam hal dukungan teknis dan fasilitas peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah daerah, sumber daya manusia, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik (Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007) bila dibandingkan dengan pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah (Fatimah,dkk: 2014).

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Dalam pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil, masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan

pemerintah daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (Dyah dan Febriyani: 2012).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Media (2012) yang berjudul pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, *Leverage* Terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita (2015) yang berjudul pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota (studi empiris kabupaten/kota di pulau sumatera), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran legislatif pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syah Arief dan Agung (2015) yang berjudul analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini adalah kelemahan SPAP dan SPPAPB, sedangkan SPAP dan SPPAPB berpengaruh negatif pada pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), variabel ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan temuan kerugian negara serta nilai kerugian negara berpengaruh negatif pada pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan.

Penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi pemberian opini BPK telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Mimelientesa dan Suryadi (2017) yang berjudul pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, opini tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini audit di kabupaten/kota provinsi riau tahun 2011-2014, hasil penelitiannya menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap opini audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2011-2014.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Dwi Ratmono (2017) yang berjudul Determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel I.1
Data Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Sumatra Selatan

No	Kabupaten/Kota	Opini					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten OKI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
5	Kabupaten Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten OKU Timur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Musi Banyuasin	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Lanjutan Tabel I.1
Data Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di
Wilayah Provinsi Sumatra Selatan

8	Kabupaten OKU Selatan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Lahat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Empat Lawang	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
11	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten OKU	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
13	Kabupaten Muara Enim	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
15	Kota Pagar Alam	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: bpk.go.id, 2019 (data diolah kembali)

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami peningkatan opini yang diberikan oleh BPK. Meningkatnya opini BPK atas LKPD tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi penemuan atas kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kelemahan tersebut dalam laporan keuangannya. Jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada perundang-undangan dapat dilihat pada lampiran tabel I.2. Fenomena masalah lain yang berhubungan dengan variabel penelitian dapat dilihat pada lampiran tabel I.3 dan I.4.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Pada Perundang-**

Undangan, Umur Pemerintah Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Opini Badan Pemeriksa Keuangan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh ketidakpatuhan pada perundang-undangan terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimanakah pengaruh umur pemerintah daerah terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimanakah pengaruh ukuran legislatif terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpatuhan pada perundang-undangan terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh umur pemerintah daerah terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahan tentang pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kerugian negara, umur pemerintah daerah, dan ukuran legislatif terhadap opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi kabupaten di Sumatera Selatan

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar mendapatkan opini lebih baik lagi dari BPK.

3. Bagi almamater

Untuk dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi (2016) *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat
- Baldric Siregar (2017) *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Desi Fatimah, dkk (2014, Oktober). Pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya Dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar Tanpa pengecualian pada laporan keuangan Pemerintah daerah di seluruh indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(1). Diakses 12 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/ipi291414.pdf
- Duwi Priyatno (2016) *SPSS Handbook* Cetakan Pertama. Yogyakarta : MediaKom
- Dwi Kusumawati dan Dwi Ratmono (2017). Determinan opini atas laporan keuangan Pemerintah daerah di indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1). Diakses 17 Oktober 2018, file: D/DATA UP/Jurnal/254114-determinan-opini-atas-laporan-keuangan-p-1cc6578e.pdf
- Dyah Setyaningrum dan Febriyani Safitri (2012, Desember). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia*, 9(2). Diakses 20 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/ANALISIS_PENGARUH_KARAKTERISTIK_PEMERINTA_H_DAERAH_.pdf
- Gita Maiyora (2015, Oktober). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera). *Jom FEKON*, 2(2). Diakses 15 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/33881-ID-pengaruh-karakteristik-pemerintah-daerah-terhadap-kinerja-keuangan-pemerintah-da.pdf
- Hari Setiyawati (2016, September). Effect of Weaknesses of the Internal Control Systems And Non-Compliance With Statutory Provisions on The Audit opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia. *Int. Journal of Engineering Research and Application*. Diakses 27 Maret 2019, ari file: D/DATA/Jurnal/ A0609050106.pdf

Justisia Sulastri Maabuat, Dkk. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan penyelesaian kerugian negara terhadap opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Diakses 15 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/14424-28836-1-SM.pdf

Mardi (2016) *Sistem Informasi Akuntansi* Cetakan Ketiga. Bogor. Ghalia Indonesia

Media Kusumawardani (2012, Agustus). Pengaruh Size, kemakmuran, ukuran legislatif, Leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1). Diakses 20 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/document(2) .pdf

Mimelientesa Irman dan Suryati (2017, Desember). Pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, opini tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2011-2014. *Kurs*, 2(2). Diakses 12 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/289-624-1-SM.pdf

Muchamad Ghufon Taufik dan Bandi (2015, Februari). Karakteristik pemerintah daerah karakteristik kepala daerah, karakteristik inspektorat daerah dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal akuntansi & bisnis*, 15(1). Diakses 16 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/177-392-1-PB.pdf

Mulyadi (2016) *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat

Munawar, Dkk (2016, Mei). Pengaruh jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. *Jurnal magister akuntansi pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2). Diakses 18 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/Munawaretal2016PengaruhJumlahTemuanAuditatasSPI dan JumlahTemuanAuditAtasKepatuhanterhadapOpinidatasLKPKab-KotadiAceh.pdf

Nova Febrianto (2018, Januari). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diakses 20 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah

Ramli Faud (2016) *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia

Syah Arief Atmaja W dan Agung Nur Probohudono (2014, November). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara. *Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, 1(1)*. Diakses 12 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/115-1-201-1-10-20180419.pdf

Tika Ernawati (2016, Agustus). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD, umur pemerintah daerah dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Diakses 18 Oktober 2018, dari file: D/DATA UP/Jurnal/NASKAH%20PUBLIKASI%20OK.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

V. Wiratna Sujarweni (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Pustakabaru Press

Yuhansi Ladewi (2018) *Sistem Informasi Akuntansi 1 (Teori dan Praktek)*. Palembang : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah